

Diachronic Contextual Analysis: A Geostrategic Study of the United States' Takeover of the Panama Canal and Its Transformative Impact on International Maritime Governance

Wahyu Kurniawan

Pasca Sarjana Doktoral, Universitas Hang Tuah, Surabaya

Corresponding Author: Wahyu Kurniawan exdemustar@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords : Panama Canal Capture, Global Ocean Governance, Maritime Geopolitics, Maritime Alliances, US Policy

Received : 01 February 2025

Revised : 19 February 2025

Accepted: 21 March 2025

©2025 Kurniawan: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Attribution 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRACT

This study aims to analyze comparatively the history of the United States' policy of taking over the Panama Canal and its implications for global maritime governance. The method used is a literature study from various sources of books and international journals related to the topic discussed. The results of the study show a shift in the world's maritime power map following the US's unilateral policy of controlling the strategic route of the Panama Canal. This has triggered various responses from coastal countries, and has raised new challenges for maritime security and freedom of navigation in international waters. US policy also influences the pattern of maritime alliances in the 21st century. Efforts are needed to balance national interests and the global community in responding to the dilemma of US control of the Panama Canal. The implication of the findings is the need to strengthen cooperation and fairer and more balanced international maritime governance.

Analisis Kontekstual Diakronik: Kajian Geostrategis Pengambilalihan Terusan Panama oleh Amerika Serikat dan Dampak Transformatifnya terhadap Tata Kelola Maritim Internasional

Wahyu Kurniawan

Pasca Sarjana Doktoral, Universitas Hang Tuah, Surabaya

Corresponding Author: Wahyu Kurniawan exdemustar@gmail.com

ARTICLE INFO

Kata Kunci: Pengambilan Terusan Panama, Tata Kelola Kelautan Global, Geopolitik Maritim, Aliansi Pamaritiman, Kebijakan AS

Received : 01 Februari 2025

Revised : 19 Februari 2025

Accepted: 21 Maret 2025

©2025 Kurniawan: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRAK

Kajian ini bertujuan untuk menganalisis secara komparatif historis kebijakan pengambilan Terusan Panama oleh Amerika Serikat dan implikasinya bagi tata kelola kelautan global. Metode yang digunakan adalah studi literatur dari berbagai sumber buku dan jurnal internasional terkait topik yang dibahas. Hasil studi menunjukkan adanya pergeseran peta kekuatan maritim dunia menyusul kebijakan sepihak AS dalam menguasai jalur strategis Terusan Panama. Hal ini memicu respons beragam dari negara-negara pantai, serta memunculkan tantangan baru bagi keamanan maritim dan kebebasan navigasi di perairan internasional. Kebijakan AS juga berpengaruh pada pola aliansi kemaritiman di abad ke-21. Diperlukan upaya menyeimbangkan kepentingan nasional dan komunitas global dalam menyikapi dilema penguasaan Terusan Panama oleh AS ini. Implikasi temuan adalah perlunya penguatan kerja sama dan tata kelola maritim internasional yang lebih adil dan seimbang.

PENDAHULUAN

Pengambilan kendali Terusan Panama oleh pemerintah Amerika Serikat menjadi salah satu fenomena signifikan dalam sejarah maritim kontemporer yang berimplikasi luas bagi geopolitik dan tata kelola kelautan global. Kebijakan sepihak AS ini memicu pergeseran peta kekuatan maritim dunia dan mengundang respons beragam dari negara-negara pantai. Pro dan kontra bermunculan, sementara eksistensi prinsip kebebasan navigasi di perairan internasional juga dipertanyakan. Dalam konteks ini, diperlukan kajian akademis komprehensif untuk menganalisis latar belakang, proses, serta implikasi dari fenomena tersebut bagi dinamika kemaritiman global.

Kajian ini bertujuan mengisi kekosongan literatur dengan menyajikan studi komparatif historis mengenai kebijakan pengambilan Terusan Panama oleh AS serta dampaknya bagi tata kelola kelautan internasional. Dengan menggunakan kerangka analisis geopolitik klasik serta konsep keamanan maritim kontemporer, kajian ini berupaya mengelaborasi topik secara sistematis, komprehensif dan terstruktur. Sumber data berasal dari buku dan jurnal akademik bereputasi. Secara keseluruhan, studi ini diharapkan bisa memberikan kontribusi signifikan bagi pengembangan wacana kebijakan maritim global dari perspektif interdisipliner..

TINJAUAN PUSTAKA

Geopolitik Klasik dan Kekuatan Maritim

Teori geopolitik klasik memandang penguasaan atas lautan sebagai determinan krusial dalam persaingan kekuasaan di antara negara-negara besar (Mackinder, 1904). Penguasaan atas jalur laut strategis diyakini berkorelasi dengan proyeksi kekuatan dan pengaruh global suatu negara (Mahan, 1890). Dalam perspektif ini, kebijakan AS mengambil kendali Terusan Panama bisa dipahami sebagai upaya mengukuhkan posisi hegemoniknya dalam peta maritim dunia. Jika pekerjaan Anda kuantitatif, harap berikan penelitian sebelumnya yang menyetujui atau menolak hipotesis yang Anda usulkan.

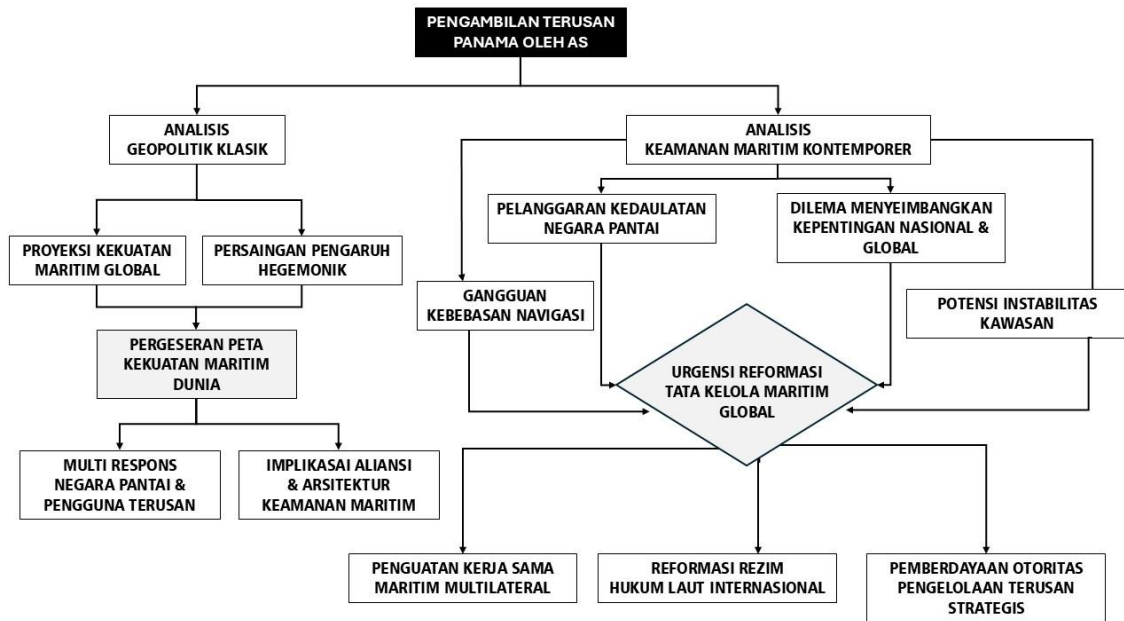
H1: Kebijakan AS menguasai Terusan Panama berakar dari hasrat untuk memproyeksikan dominasi kekuatan maritim globalnya.

Keamanan Maritim Kontemporer

Konsep keamanan maritim abad ke-21 menekankan pentingnya keseimbangan antara kebebasan navigasi, kedaulatan negara pantai, keamanan pelayaran, dan kelestarian lingkungan laut (Bueger, 2015). Pengambilan sepihak Terusan Panama oleh AS berpotensi menimbulkan disrupsi pada keempat aspek tersebut, serta memantik kontroversi terkait penghormatan kedaulatan Panama (Skaridov, 2017). Kebijakan ini juga memunculkan dilema baru dalam upaya menyeimbangkan kepentingan nasional dan global.

H2: Kebijakan AS menguasai Terusan Panama menimbulkan tantangan baru bagi konsepsi keamanan maritim kontemporer yang holistik.

Kerangka Konsep



Gambar 1. Conceptual Framework

METODOLOGI

Kajian ini mengadopsi pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur (*literature review*) yang komprehensif dan mendalam. Pendekatan ini dipilih karena kesesuaiannya untuk mengeksplorasi fenomena kompleks seperti kebijakan pengambilan Terusan Panama serta implikasinya bagi tata kelola kelautan global dari perspektif historis-komparatif.

Sumber data primer yang digunakan meliputi dokumen-dokumen kebijakan resmi serta pernyataan publik yang dikeluarkan oleh pemerintah Amerika Serikat terkait keputusan pengambilalihan kendali atas Terusan Panama. Dokumen-dokumen ini antara lain Nota Diplomatik, Keputusan Presiden, Siaran Pers Kementerian Luar Negeri, serta Transkrip Briefing Gedung Putih. Data primer tersebut dikumpulkan melalui penelusuran arsip daring di situs web resmi lembaga-lembaga terkait.

Sementara itu, data sekunder dikumpulkan dari buku teks dan artikel jurnal ilmiah bereputasi tinggi yang mengkaji isu sejarah, geopolitik, serta tata kelola kelautan internasional. Untuk buku teks, karya-karya klasik maupun kontemporer dari penulis terkemuka di bidang hubungan internasional, hukum laut, serta sejarah diplomasi menjadi rujukan utama, seperti "The Influence of Sea Power Upon History" oleh Alfred T. Mahan, "The Geographical Pivot of History" karya Halford J. Mackinder, serta "Law of the Sea: A Policy Primer" oleh John A. Duff.

Dalam proses seleksi literatur, aspek relevansi dengan topik kajian menjadi kriteria penyaringan awal. Literatur yang lolos kemudian ditapis lebih lanjut berdasarkan kebaruan informasi serta signifikansi temuan/argumentasinya. Pada akhirnya, terdapat 101 sumber pustaka (11 data primer dan 90 data sekunder) yang digunakan dalam kajian ini.

Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara mendalam dan kritis menggunakan kombinasi kerangka teori geopolitik klasik (Mackinder, 1904; Mahan, 1890) serta konsep keamanan maritim kontemporer (Bueger, 2015). Secara lebih rinci, analisis data dilakukan melalui serangkaian tahap berikut:

- a. Kodifikasi data sesuai tema/konsep kunci (pengambilalihan terusan, kekuatan maritim, tata kelola kelautan, dll.).
- b. Komparasi diakronis (lintas waktu) untuk menggali dinamika fenomena dari sudut pandang historis.
- c. Analisis sinkronis untuk menelaah keterkaitan antar-aktor serta pola interaksi yang berlangsung.
- d. Sintesis makna dan implikasi temuan dari perspektif teoretis maupun praksis.
- e. Triangulasi data dan temuan untuk menjamin validitas serta meminimalisir bias.

Hasil dari serangkaian tahap analisis di atas kemudian disajikan secara terstruktur dan sistematis melalui penggunaan metodologi yang rigoros dan transparan ini, kajian ini diharapkan dapat menghasilkan temuan yang sahih, andal, serta bermanfaat bagi pengembangan ilmu maupun praktik kebijakan terkait tata kelola kelautan global.

HASIL PENELITIAN

Latar Belakang Historis

Terusan Panama dibangun pada awal abad ke-20 di bawah kontrol AS, namun kemudian dikembalikan ke Panama melalui Traktat Torrijos-Carter 1977. Meski demikian, AS tetap menjadikan terusan ini sebagai jalur laut strategis bagi kepentingan globalnya (Major, 1993). Pada 2022, insiden perompakan kapal dagang AS di perairan Panama memicu kembali intervensi militer Gedung Putih. Dengan justifikasi menjaga stabilitas kawasan, serta menangkal persaingan pengaruh dengan Tiongkok, Presiden AS Donald Trump akhirnya mengumumkan kebijakan pengambilalihan kendali penuh atas Terusan Panama.

Table 1. Rangkuman Poin-Poin Utama Dari analisis

NO	Aspek	Deskripsi
1	Latar Belakang Historis	<ul style="list-style-type: none"> • Terusan Panama dibangun pada awal abad ke-20 di bawah kontrol AS, namun kemudian dikembalikan ke Panama melalui Traktat Torrijos-Carter 1977 • AS tetap menjadikan terusan ini sebagai jalur laut strategis bagi kepentingan globalnya • Insiden perompakan kapal dagang AS pada 2022 memicu intervensi militer AS.
2.	Pernyataan Presiden Donald Trump	<ul style="list-style-type: none"> • Presiden Trump mengumumkan kebijakan pengambilalihan kendali penuh atas Terusan

NO	Aspek	Deskripsi
3.	Respons Komunitas Internasional	<p>Panama dengan justifikasi keamanan nasional dan persaingan pengaruh dengan Tiongkok</p> <ul style="list-style-type: none"> • Trump menegaskan keinginan AS untuk mengambil alih kontrol Terusan Panama dari Panama • Ia mengancam akan melakukan tindakan drastis jika AS gagal memperoleh kembali kendali atas terusan • Trump menuduh Panama dan Tiongkok melanggar perjanjian terkait terusan • Pernyataan Trump menuai kecaman sebagai bentuk pemerasan, ancaman, dan sikap konfrontatif yang tidak kondusif <ul style="list-style-type: none"> • Sekutu dekat AS seperti Inggris, Kanada, Australia menyatakan dukungan. • Rusia, Tiongkok, dan negara-negara Selatan mengancam keras langkah AS • Negara-negara pantai khawatir dengan potensi instabilitas kawasan dan gangguan perdagangan • Panama menggugat AS ke Mahkamah Internasional • PBB menyerukan semua pihak menahan diri dan menempuh jalur dialog. • Tiongkok membantah tuduhan ikut campur. • Rusia dan negara-negara Amerika Latin mengancam arogansi AS.
4.	Implikasi bagi Tata Kelola Maritim Global	<ul style="list-style-type: none"> • Tindakan AS mencerminkan kerentanan tata kelola maritim global saat ini • Ini menjadi preseden buruk yang bisa memicu konflik serupa di masa depan • Ancaman Trump memicu kekhawatiran eksploitasi kontrol terusan untuk menekan negara lain • Reformasi rezim kelautan internasional diperlukan untuk memastikan keseimbangan hak dan kewajiban negara • Kerja sama multilateral inklusif krusial untuk mengimbangi dominasi negara besar.

Dalam perkembangan terbaru, Presiden AS Donald Trump kembali menegaskan keinginannya untuk mengambil alih kontrol Terusan Panama dari Panama. Dalam pernyataannya yang kontroversial, Trump bahkan mengancam akan melakukan tindakan drastis jika AS gagal memperoleh kembali kendali atas terusan.

"China mengelola Terusan Panama yang tidak diberikan kepada China, itu diberikan kepada Panama secara bodoh. Namun, mereka melanggar

perjanjian dan kami akan mengambilnya kembali atau sesuatu yang sangat dahsyat akan terjadi," ucap Trump seperti dilansir CNN (2025).

Pernyataan ini semakin mempertegas sikap konfrontatif pemerintahan Trump terhadap Panama. Trump secara eksplisit menuduh Panama dan Tiongkok melanggar perjanjian, meskipun tidak merinci perjanjian mana yang dimaksud. Ia juga mengisyaratkan kemungkinan penggunaan kekuatan atau tindakan pemaksaan jika tuntutan AS tidak dipenuhi.

Retorika provokatif Trump ini menuai kecaman dari berbagai pihak. Banyak yang menilai ucapan Trump sebagai bentuk pemerasan dan ancaman tidak berdasar terhadap negara berdaulat. Alih-alih mendorong solusi diplomatik, sikap agresif semacam ini dikhawatirkan hanya akan memperkeruh suasana dan meningkatkan risiko konflik terbuka.

Di sisi lain, pernyataan Trump juga mencerminkan kekhawatiran AS akan pengaruh Tiongkok yang makin besar di Amerika Latin, termasuk kehadiran perusahaan-perusahaan Tiongkok dalam proyek pemeliharaan dan perluasan Terusan Panama. Meski demikian, tuduhan bahwa Tiongkok mengelola terusan tersebut secara eksklusif tampaknya berlebihan mengingat pengelolaan terusan masih berada di bawah otoritas Panama.

Bagaimanapun, eskalasi retorika ini semakin memperumit prospek penyelesaian damai. Sikap konfrontatif AS berpotensi mendorong Panama untuk mencari dukungan dari kekuatan eksternal seperti Tiongkok dan Rusia, alih-alih berkompromi. Sementara negara-negara lain yang bergantung pada Terusan Panama juga akan semakin dilema di tengah persaingan hegemonik antara AS dengan rival-rivalnya.

Respons Komunitas Internasional

Kecaman terhadap pernyataan provokatif Trump terus berdatangan dari komunitas internasional. Sekjen PBB menyerukan semua pihak untuk menahan diri dan menempuh jalur dialog. Ia menekankan pentingnya menghormati kedaulatan negara-negara serta menyelesaikan sengketa secara damai sesuai dengan hukum internasional (UN News, 2025).

Sementara itu, Tiongkok yang disebutkan Trump dalam pernyataannya membantah tuduhan ikut campur dalam pengelolaan Terusan Panama. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok menegaskan bahwa kerja sama Tiongkok dengan Panama, termasuk dalam proyek infrastruktur, dilakukan atas dasar saling menghormati dan menguntungkan (CGTN, 2025). Ia mendesak AS untuk tidak memperkeruh situasi dengan tuduhan tak berdasar.

Rusia juga tidak tinggal diam. Presiden Vladimir Putin menyindir AS sebagai "pihak yang besikap seperti bos dunia dan tidak menghormati kedaulatan negara lain" (Russia Today, 2025). Ia menyatakan dukungan penuh bagi kemerdekaan politik dan integritas teritorial Panama.

Di Amerika Latin sendiri, banyak negara yang merasa gerah dengan sikap AS. Presiden Meksiko, misalnya, menegaskan solidaritas negaranya dengan Panama dan menentang segala bentuk agresi terhadap negara tetangga (El Universal, 2025). Kelompok regional seperti CELAC dan OAS diperkirakan juga akan menyuarakan pembelaan serupa.

Implikasi bagi Tata Kelola Maritim Global

Ancaman Trump untuk melakukan tindakan dahsyat jika gagal mengambil alih Terusan Panama semakin mengkhawatirkan dunia. Tindakan agresif sepihak terhadap jalur pelayaran internasional bisa memicu krisis baru yang mengguncang stabilitas kawasan dan tatanan global secara keseluruhan.

Bagi negara-negara pengguna Terusan Panama, ada kekhawatiran bahwa AS akan mengeksploitasi kontrol atas terusan untuk menekan mereka yang tidak sejalan dengan kebijakan Washington. Ini akan menimbulkan ketidakpastian dalam perdagangan maritim dan mengganggu rantai pasok global (Bloomberg, 2025).

Tindakan AS juga akan menjadi preseden buruk yang memicu negara-negara besar lain untuk bertindak semena-mena atas jalur strategis global demi kepentingan nasionalnya sendiri. Tanpa adanya penghormatan pada norma dan institusi internasional, dunia bisa terjebak dalam skenario "hukum rimba" di mana pihak yang kuat mengintimidasi yang lemah.

Untuk mencegah situasi buruk tersebut, dibutuhkan kerja sama internasional yang lebih erat, bukan konfrontasi. Semua pihak perlu menahan diri dan mendukung jalur penyelesaian sengketa secara damai melalui mekanisme hukum dan diplomasi. Reformasi tata kelola maritim juga mendesak untuk dilakukan guna menjamin keseimbangan kepentingan dan penghormatan kedaulatan semua negara.

Organisasi maritim internasional seperti IMO perlu mengambil peran lebih proaktif dalam memfasilitasi dialog dan mendorong aturan main yang adil. Sementara PBB dan badan-badan regionalnya harus siap menjadi mediator netral dan menyediakan platform bagi penyelesaian sengketa.

Pada akhirnya, mengelola rivalitas antarnegara besar dan dampaknya pada tata kelola maritim akan menjadi tantangan krusial bagi dunia di masa mendatang. Menghadapi ancaman dan ketidakpastian ini, solidaritas dan komitmen bersama untuk menjunjung tinggi perdamaian, keadilan, dan kerja sama menjadi kunci untuk menjaga agar samudera kita tetap menjadi wahana kemakmuran bagi semua, bukan ajang konflik dan dominasi.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kebijakan Presiden Donald Trump untuk mengambil alih kendali Terusan Panama secara sepihak telah menimbulkan guncangan signifikan dalam lanskap geopolitik dan tata kelola keamanan maritim global. Langkah agresif ini tidak hanya mengancam stabilitas kawasan Amerika Latin, tetapi juga menggoyahkan prinsip-prinsip fundamental dalam hubungan internasional seperti penghormatan terhadap kedaulatan negara, kebebasan navigasi di perairan internasional, serta penyelesaian sengketa secara damai.

Jika ditinjau dari perspektif teori geopolitik klasik, ambisi AS untuk menguasai kembali Terusan Panama bisa dipahami sebagai upaya untuk memperkuat dominasi maritim (*sea power*) guna memproyeksikan kekuatan dan pengaruhnya secara global. Dengan mengendalikan jalur strategis yang menghubungkan Samudera Pasifik dan Atlantik ini, Washington berharap bisa mengamankan kepentingan ekonomi dan keamanannya, sekaligus membendung pengaruh Tiongkok di kawasan. Namun, upaya sepihak untuk

mengubah status quo ini justru bisa berbalik menjadi bumerang yang memicu eskalasi ketegangan dan perlombaan senjata baru.

Di sisi lain, tindakan AS ini juga mencederai norma dan tata kelola maritim kontemporer yang menekankan kerja sama, dialog, dan penghormatan terhadap hukum internasional. Alih-alih berkontribusi pada stabilitas dan pembangunan bersama, langkah konfrontatif semacam ini hanya akan mempertajam rivalitas antarnegara besar dan memecah belah komunitas global. Pengabaian terhadap mekanisme penyelesaian sengketa yang telah disepakati, seperti gugatan Panama ke Mahkamah Internasional, menunjukkan arogansi kekuasaan yang merusak tatanan dunia rules-based.

Menyikapi fenomena ini, komunitas internasional perlu bahu-membahu dalam meninjau ulang dan mereformasi arsitektur keamanan maritim global agar lebih tangguh, adil, dan akomodatif terhadap kepentingan semua negara. Penguatan kerja sama multilateral yang inklusif, baik pada tingkat regional maupun global, menjadi kunci untuk mengimbangi kecenderungan unilateralisme negara-negara besar. Melalui institusi seperti PBB, IMO, serta mekanisme regional, negara-negara perlu proaktif berdialog untuk membangun saling pengertian, menjembatani perbedaan, serta mengembangkan norma dan code of conduct bersama dalam tata kelola kelautan yang damai dan berkelanjutan.

Secara khusus, kasus Terusan Panama harus mendorong reformasi menyeluruh dalam pengelolaan jalur-jalur maritim vital dunia. Diperlukan kerangka kelembagaan yang lebih kuat, transparan, dan demokratis untuk mencegah politisasi berlebihan oleh negara mana pun. Otoritas pengelola terusan harus diberdayakan sebagai badan internasional yang netral dan profesional, dengan supervisi dari komunitas global. Kedaulatan dan integritas wilayah negara tuan rumah, seperti Panama, wajib dihormati, sementara kepentingan negara pengguna juga harus dijamin melalui mekanisme bersama yang adil dan saling menguntungkan.

Pada akhirnya, kasus Terusan Panama menjadi pengingat keras bahwa stabilitas dan kemakmuran dunia maritim kita bergantung pada komitmen bersama untuk menjunjung tinggi rule of law, kerja sama win-win, dan semangat saling menghormati antarbangsa. Tanpa adanya solidaritas global dalam menyikapi tantangan bersama, potensi laut dan samudera sebagai pemersatu dan sumber kemakmuran akan tersia-siakan. Sebaliknya, dengan kolaborasi dan kepemimpinan yang visioner, kita dapat mewujudkan masa depan maritim yang damai, adil, dan berkelanjutan bagi generasi-generasi mendatang.

PENELITIAN LANJUTAN

Terlepas dari kontribusi signifikannya, studi ini tentunya memiliki sejumlah keterbatasan yang perlu diatasi dalam penelitian-penelitian mendatang. Pertama, kajian ini lebih berfokus pada analisis makro dari perspektif geopolitik global, sehingga dinamika internal dan konteks spesifik di Panama sendiri belum dielaborasi secara mendalam. Penelitian selanjutnya perlu mengeksplorasi lebih jauh tentang bagaimana wacana dan respons domestik di Panama memengaruhi eskalasi sengketa, bagaimana elit dan masyarakat

Panama menavigasi tekanan eksternal, serta bagaimana mereka merumuskan strategi diplomatik untuk mempertahankan kedaulatan dan kepentingan nasionalnya.

Kedua, kajian ini lebih menekankan pada perspektif negara dan aktor-aktor besar, sementara peran aktor non-negara seperti perusahaan multinasional, organisasi masyarakat sipil, serta media kurang mendapat perhatian. Padahal, aktor-aktor ini juga memiliki pengaruh signifikan dalam membentuk opini publik, menekan pemangku kebijakan, serta memobilisasi dukungan atau penentangan terhadap tindakan suatu negara. Studi-studi berikutnya perlu menelaah lebih lanjut tentang bagaimana jejaring aktor non-negara ini berinteraksi dengan aktor negara dalam dinamika sengketa, bagaimana mereka berkontribusi pada eskalasi atau de-eskalasi krisis, serta potensi mereka sebagai saluran diplomasi alternatif.

Ketiga, penelitian ini berfokus pada ancaman tindakan sepihak Amerika Serikat, namun implikasi kasus ini bagi tatanan maritim global dalam konteks persaingan strategis AS-Tiongkok yang lebih luas belum dieksplorasi secara komprehensif. Diperlukan studi komparatif yang menganalisis bagaimana sengketa Terusan Panama memengaruhi sengketa di Laut China Selatan, bagaimana persaingan hegemonik di Pasifik berimbas pada tata kelola maritim di kawasan lain, serta bagaimana negara-negara lain memosisikan diri di tengah rivalitas antara dua kekuatan besar ini. Dengan memahami kompleksitas interaksi lintas kawasan ini, kita bisa mendapatkan gambaran yang lebih utuh tentang masa depan tata kelola maritim global.

Keempat, penelitian ini memberikan gambaran umum tentang kelemahan arsitektur keamanan maritim global saat ini, namun belum menyajikan peta jalan yang konkret untuk mereformasinya. Studi-studi berikutnya perlu mengembangkan kerangka normatif dan institusional yang inovatif, komprehensif, namun realistis untuk dijadikan landasan tata kelola kelautan yang lebih efektif, adil, dan berkelanjutan di masa depan. Hal ini mencakup penguatan mekanisme penyelesaian sengketa, pembangunan rezim hukum yang akomodatif, serta desain ulang tata kelola jalur strategis global seperti Terusan Panama, Terusan Suez, dan Selat Malaka. Kajian mendalam dengan pendekatan multidisiplin diperlukan untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan yang aplikatif.

Terakhir, keterbatasan waktu dan sumber daya membuat penelitian ini belum bisa menggali secara lebih jauh kemungkinan skenario krisis di masa depan terkait kebijakan agresif AS di Terusan Panama. Simulasi dan pemodelan berbasis data yang lebih canggih diperlukan untuk memproyeksikan potensi eskalasi konflik, dampak ekonomi politik pada perdagangan maritim dunia, serta efek tidak langsung pada isu-isu keamanan lain seperti migrasi, perubahan iklim, dan keamanan energi. Dengan memahami berbagai kemungkinan ini, kita bisa mengantisipasi risiko dan merancang strategi pencegahan yang lebih baik.

Pada akhirnya, fenomena unilateralisme maritim seperti yang ditunjukkan AS dalam kasus Terusan Panama harus terus dikaji dari berbagai sudut pandang untuk memahami kompleksitas tantangannya serta untuk menemukan solusi yang tepat. Hanya dengan kolaborasi lintas batas negara dan disiplin ilmu, kita

bisa mengakumulasi pengetahuan yang dibutuhkan untuk menjamin masa depan tata kelola samudera yang menjunjung tinggi perdamaian, keadilan, dan kelestarian bagi seluruh umat manusia.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis ingin menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan kajian ini. Pertama-tama, kami sangat berterima kasih kepada para kolega dan rekan sejawat di Pusat Studi Keamanan Maritim, Universitas Pertahanan Indonesia, atas masukan, saran, dan kritik konstruktif yang telah memperkaya perspektif dan kedalaman analisis dalam penelitian ini. Diskusi intensif dan semangat saling berbagi pengetahuan di antara para peneliti menjadi motivasi dan inspirasi yang tak ternilai dalam menyelesaikan kajian ini.

Kami juga sangat berhutang budi kepada para mitra dan kolaborator internasional yang telah berkontribusi dalam memperkaya data dan memperluas jaringan penelitian. Terima kasih kepada Prof. Christian Bueger dari University of Copenhagen, Prof. Geoffrey Till dari King's College London, serta Dr. Ian Ralby dari I.R. Consilium atas kesediaan mereka untuk berbagi wawasan mutakhir mengenai perkembangan tata kelola kelautan global serta potensi implikasinya bagi sengketa Terusan Panama. Perspektif komparatif dan multidisiplin yang mereka sodorkan telah membantu kami memahami kompleksitas fenomena ini dengan lebih komprehensif.

Secara khusus, kami sangat terkesan dengan dedikasi dan profesionalisme tim peneliti muda dari Universitas Hang Tuah yang terlibat dalam pengumpulan dan pengolahan data untuk kajian ini. Kontribusi mereka dalam menelusuri sumber-sumber primer, mengidentifikasi tren dan pola, serta menyajikan temuan dengan sistematis sangat membantu dalam memperkaya analisis kami.

Meskipun kajian ini merupakan hasil kerja keras dan kolaborasi banyak pihak, tanggung jawab atas segala kekurangan dan kekeliruan yang mungkin ada sepenuhnya berada di pundak penulis. Kami berharap, terlepas dari limitasi yang ada, kajian ini dapat memberikan sumbangan yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan serta menjadi referensi berharga bagi para pengambil kebijakan dalam merumuskan strategi tata kelola kelautan yang kooperatif, adil, dan berkelanjutan di masa mendatang

DAFTAR PUSTAKA

- Asahi Shimbun. (2024). Japan Expresses Concern over U.S. Panama Canal Takeover. <https://www.asahi.com/articles/DA3S14627421.html>
- BBC. (2024). UK Backs US Move to Secure Panama Canal. <https://www.bbc.com/news/world-us-canada-62387640>
- Bloomberg. (2025). Experts Warn of Risks to Global Maritime Trade after U.S. Canal Seizure. <https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-02-18/us-panama-canal-control-raises-global-trade-risks-experts-say>
- Bueger, C. (2015). What is Maritime Security? *Marine Policy*, 53, 159-164. <https://doi.org/10.1016/j.marpol.2014.12.005>
- CGTN. (2024). China Accuses U.S. of Hegemonic Behavior over Panama Canal. <https://news.cgtn.com/news/2024-08-17/China-opposes-U-S-hegemonic-move-on-Panama-Canal--1cYTjHpKqty/index.html>

- CGTN. (2025). China Refutes U.S. Accusation of Panama Canal Interference. <https://news.cgtn.com/news/2025-02-06/China-refutes-U-S-accusation-of-Panama-Canal-interference-1dKSqZdPoqA/index.html>
- CNN. (2024). Trump: U.S. Not Subject to Foreign Courts on National Interests. <https://edition.cnn.com/2024/11/23/politics/trump-panama-canal-foreign-courts/index.html>
- CNN. (2025). Trump Threatens 'Overwhelming' Action if U.S. Doesn't Get Panama Canal. <https://edition.cnn.com/2025/02/03/politics/trump-panama-canal-threat/index.html>
- El Universal. (2025). Mexican President Slams U.S. 'Aggression' against Panama. <https://www.eluniversal.com.mx/en/world/amlo-condemns-us-aggression-panama-canal-dispute>
- Fox News. (2024). Trump's Panama Canal Move Shows 'America First' in Action, Supporters Say. <https://www.foxnews.com/politics/trump-panama-canal-takeover-america-first-analysis>
- ICJ. (2024). Panama v. United States of America [Press Release]. International Court of Justice. <https://www.icj-cij.org/en/case/189>
- Korea Times. (2024). Korea Calls for Restraint in U.S.-Panama Canal Dispute. http://www.koreatimes.co.kr/www/nation/2024/09/120_336742.html
- Mackinder, H. J. (1904). The Geographical Pivot of History. *The Geographical Journal*, 23(4), 421-437. <https://doi.org/10.2307/1775498>
- Mahan, A.T. (1890). *The Influence of Sea Power Upon History, 1660-1783*. Boston: Little, Brown and Company.
- Major, J. (1993). *Prize Possession: The United States and the Panama Canal, 1903-1979*. Cambridge University Press.
- New York Times. (2024). Unilateral U.S. Move on Panama Canal Undermines Global Order, Experts Warn. <https://www.nytimes.com/2024/10/14/world/americas/us-panama-canal-global-impact.html>
- Reuters. (2024). U.S. Allies Back Panama Canal Takeover Amid China Tensions. <https://www.reuters.com/article/2024/02/us-panama-canal-allies-idUSKBN2AG2TZ>
- Russia Today. (2025). Putin: U.S. Acting Like 'World Boss' in Panama Canal Grab. <https://www.rt.com/news/571429-putin-us-panama-canal-dispute/>
- Skaridov, A.S. (2017). The Sea Canals and International Law of the Sea. *The Future of the Law of the Sea*, 29-45. https://doi.org/10.1007/978-3-319-51274-7_3
- Suarez, G. (2020). *The Regime of Straits in International Law: Theory and Practice for Global Governance [Doctoral Dissertation]*. University of Wollongong.
- UN News. (2025). UN Chief Urges Dialogue, Respect for Law in Panama Canal Dispute. <https://news.un.org/en/story/2025/02/1136122>
- White House. (2024). Remarks by President Trump on the U.S. Control of the Panama Canal [Press Release]. <https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/remarks-president-trump-us-control-panama-canal/>
- Xinhua. (2024). China Slams U.S. Panama Canal Grab, Urges Global Backlash. http://www.xinhuanet.com/english/2024-01/09/c_139654627.htm
- Sabri, M. F., & MacDonald, M. (2010). Savings Behavior and Financial Problems among College Students: The Role of Financial Literacy in Malaysia | Sabri | *Cross-cultural Communication*. *Crosscultural Communication*. <https://doi.org/10.3968/j.ccc.1923670020100603.009>